

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pandangan partai politik di Banjarmasin terhadap sistem proporsional terbuka dan tertutup. Dari tiga partai politik (PAN, PKS, dan PDIP), dua (PAN dan PKS) memandang bahwa sistem proporsional terbuka adalah sistem yang meningkatkan kualitas demokrasi diberbagai aspek. Di dalam sistem proporsional terbuka terkandung nilai-nilai kedaulatan rakyat, representasi, dan demokrasi. Dan memandang sistem proporsional tertutup adalah suatu kemunduran demokrasi. Sementara PDIP memandang sistem proporsional terbuka sangat individual, PDIP memandang sistem proporsional tertutup bisa meminimalisir gesekan antar kader. Sehingga diharapkan kerja-kerja politik akan menjadi lebih optimal. Sistem proporsional tertutup juga akan membersihkan kadernya dari para kader oportunist semata.
2. Masing-masing partai politik memiliki dalil mengenai pandangan terhadap sistem proporsional terbuka dan tertutup. Seperti pada pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyatakan, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. PDIP juga mendasari pandangannya bahwa sistem

proporsional tertutup adalah yang sesuai dengan UUD 1945 yakni peserta pemilu itu adalah partai politik bukan individu seperti Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945. PKS memandang putusan MK pada tahun 2008 lalu yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 memberi kesempatan bagi rakyat untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara langsung.

B. Saran-saran

1. Partai politik diharapkan bisa memilih sistem proporsional yang ideal untuk digunakan di pemilu berikutnya, di mana sistem itu memang untuk masyarakat bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Apabila nantinya sistem proporsional terbuka masih diterapkan pada pemilu tahun 2024 nanti, sebaiknya praktik politik uang langsung dicerahkan kepada logika dan psikologi masyarakat, terlebih para elite politik tidak mampu memberikan pencerah dan malah ikut beradaptasi pada kondisi politik yang tidak sehat.
3. Apabila nantinya sistem proporsional tertutup yang akan diterapkan pada pemilu selanjutnya, maka sistem proporsional tertutup perlu diawali dengan proses kandidasi di internal partai politik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, perlu juga edukasi kepada masyarakat dan dikenalkan nama-nama yang akan dicalonkan oleh sebuah partai.